

Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Roy Suryo Kembali Ajukan Praperadilan Lagi

Jakarta, MIMBAR - Roy Suryo kembali mengajukan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Kali ini, Roy mengajukan gugatan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam kasus tersebut. Permohonan praperadilan tersebut didaftarkan ke pengadilan pada Kamis, 2 Juli 2026 dan teregistrasi dengan nomor perkara: 108/Pid.Pra/2026/PN JKT.

■ Bersambung ke Hal 7



TNI Buka Suara Pasca Kolonel Budi Diduga Terlibat Kasus Korupsi MBG

Jakarta, MIMBAR - Mabes TNI buka suara terkait keterlibatan anggota TNI AD Kolonel Budi Utomo dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Muhammad Nas mengatakan pihaknya menghormati penuh proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung). "TNI mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menyerahkan proses pembuktian kepada aparat

■ Bersambung ke Hal 7

KPK Temukan 55 Kg Platinum di Mobil Bupati Langkat

Ondim Tahu Hendak di-OTT

KPK menyebut Bupati Langkat, Syah Afandin alias Ondim mengetahui bakal ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein menyebut kasus ini bermula ketika Syah meminta sisa fee proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Permukiman Langkat yang sedang dikerjakan oleh Yaqub Abdhal Al Mu'arif.

■ Bersambung ke Hal 7

Nilainya mencapai Rp40 Miliar

Jakarta, MIMBAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 55 kilogram logam mulia jenis platina atau platinum di mobil milik Bupati Langkat, Syah Afandin alias Ondim.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein menyebut barang bukti logam mulia itu ditemukan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (2/7). "Tim juga menemukan 55 keping logam platinum dengan total berat kurang lebih 55 kilogram di mobil SAF," ujarnya dalam konferensi pers,

■ Bersambung ke Hal 7



Bupati Gowa Laporkan Wartawan

Makassar, MIMBAR - Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang melaporkan wartawan, Saenal Abidin dan Kepala Dinas Perhubungan Gowa, Agussalim Harahap usai menjadi saksi dalam sidang panitia khusus (pansus) hak angket DPRD Gowa, Sulawesi Selatan, ke Bareskrim Polri terkait dugaan perkara pencemaran nama baik.

■ Bersambung ke Hal 7

BPS Tegaskan Sensus Ekonomi Bukan Pendataan untuk Penarikan Pajak

Jakarta, MIMBAR - Hingga kini, masih kerap terdengar anggapan bahwa data yang dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi digunakan untuk penarikan pajak. Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan, Sensus Ekonomi memiliki tujuan berbeda. Dalam 10 tahun, banyak hal terjadi dalam perekonomian negara, dan data administrasi tidak cukup untuk memotret seluruh perubahan. Untuk itu, pemerintah mengadakan Sensus Ekonomi yang

kemudian digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan dan kebijakan yang berdampak kepada masyarakat. Sensus Ekonomi diadakan untuk menghasilkan statistik resmi yang menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Data yang dikumpulkan akan diolah menjadi statistik agregat

■ Bersambung ke Hal 7

Korban Tewas Gempa Venezuela Bertambah Jadi Hampir 3.000 Orang

Jakarta, MIMBAR - Korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela bertambah menjadi hampir 3.000 orang, berdasarkan data resmi terbaru pada Sabtu (4/7).

■ Bersambung ke Hal 7

Hidayah

Masyarakat Melawan Narkoba

Oleh Dr. A. Rasyid, MA

Peredaran narkotika tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan yang hanya menjadi urusan aparat penegak hukum. Jaringan narkoba telah menyusup ke berbagai lapisan masyarakat, merusak generasi muda, menghancurkan keluarga, dan menggerogoti masa depan bangsa. Karena itu, pemberantasan narkoba hanya akan berhasil apabila menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Belakangan ini semakin banyak



■ Bersambung ke Hal 7

MBG: Ketika Sepiring Nasi Membawa Harapan

Oleh: Masrin

Tulisan ini masih tetap membicarakan apa yang tersaji di dalam omprongan MBG. Dan memang, persoalannya bukan semata pada rasa makanan. Karena anak-anak itu makhluk yang sederhana. Hari ini mereka bilang kurang suka. Besok bisa saja mereka bilang enak. Lidah mereka masih berubah-ubah. Selera mereka juga belum tentu sama. Tetapi persoalan lainnya adalah tentang kecukupan.

■ Bersambung ke Hal 7



KORAN

MIMBAR UMUM

HARGA BARU

BERLANGGANAN KORAN

1 BULAN = Rp. 20.000

12 BULAN = Rp. 120.000

TERSEDIA DI myedisi reader

BISA DOWNLOAD APLIKASI DI

Download on the App Store

Masuk dia ..
Hehehe ...

KPK Temukan 55 Kg Platinum di Mobil

Dari Halaman 1

akhir pekan kemarin (3/7).
Taufik menjelaskan, dari hasil penelusuran awal, pihaknya memperkirakan satu keping logam tersebut bernilai sekitar Rp900 juta. Sehingga nilai keseluruhan platinum yang ditemukan tersebut diperkirakan mencapai Rp40 miliar.
"Dugaan awal itu ada nilainya karena kalau kita browsing di website yang umum bahwa itu bernilai per kepingnya itu Rp900 jutaan. Sudah dicek di website sehingga kalau dikalikan 55 keping itu sekitar Rp40-an miliar," tuturnya.

Ondim Tahu Hendak di-OTT

Dari Halaman 1

Ia menjelaskan Yaqub merupakan pihak swasta sekaligus Tim Sukses Syah pada saat Pilkada 2024. Ia mengatakan keduanya juga telah menyepakati fee yang akan diberikan sebesar Rp1,2 miliar.
Akan tetapi, Taufik mengayakan total uang yang baru diterima Syah hanya Rp800 juta. Karenanya, Syah meminta sisanya kepada Yaqub namun hanya disanggupi Rp100 juta.
Ia menuturkan rencananya uang itu akan diserahtakan pada Rabu (1/7). Syah kemudian menghubungi Yaqub untuk bertemu usai menghadiri acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
Kendati demikian, rencana pertemuan itu batal karena Syah mengetahui dirinya sedang dipantau oleh KPK. Sekitar pukul 23.00 WIB,

Roy Suryo Kembali Ajukan Praperadilan Lagi

Dari Halaman 1

SEL.
Tergugat I adalah Kapolda Metro Jaya cq Dirreskrimum Polda Metro Jaya cq Kasubdit Kamneg cq Tim Penyidik. Sementara Tergugat II adalah Kejati DKI Jakarta cq Aspidum Kejati DKI Jakarta cq Kejari Jaksel cq Tim JPU.
"Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penetapan tersangka," demikian dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Minggu (5/7).
Saat dikonfirmasi, kuasa hukum Roy, Refly Harun membenarkan soal gugatan praperadilan tersebut. Gugatan praperadilan itu terkait penerapan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Kita mau menguji keabsahan penggunaan pasal tersebut, karena kita menganggap tidak memenuhi minimal dua alat bukti, karena ter-

TNI Buka Suara Pasca Kolonel Budi Diduga

Dari Halaman 1

penegak hukum," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7).
Nas mengaku pihaknya akan segera berkoordinasi dengan penyidik Kejaksaan terkait temuan tersebut untuk nantinya ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebelumnya Kejagung mengungkap peran Sekretaris Deputy Bidang Penyediaan dan Penyaluran di Badan Gizi Nasional (BGN) Kolonel Cpl Budi Utomo di kasus korupsi tata kelola program MBG.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulae-man Nahdi mengatakan Budi bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, terutama pengadaan

BPS Tegaskan Sensus Ekonomi Bukan Pendataan

Dari Halaman 1

yang memberikan informasi mengenai struktur usaha, kapasitas ekonomi rumah tangga, potensi ekonomi wilayah, serta berbagai perubahan yang terjadi dalam perekonomian Indonesia.
Informasi tersebut lalu menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun berbagai kebijakan

MBG: Ketika Sepiring Nasi Membawa Harapan

Dari Halaman 1

Karena MBG sejak awal lahir bukan sekadar untuk memastikan anak-anak tidak lapar di sekolah. Program ini datang dengan cita-cita yang jauh lebih besar. Ada soal gizi. Ada soal stunting. Ada soal kualitas sumber daya manusia. Ada juga cerita besar tentang masa depan bangsa.
Artinya yang sedang dibagikan bukan sekadar nasi, lauk, dan buah. Yang sedang dibagikan adalah harapan. Harapan bahwa anak-anak yang hari ini duduk di bangku sekolah akan tumbuh lebih sehat. Akan belajar lebih baik. Akan memiliki masa depan yang lebih baik.
Karena itulah pertanyaannya juga menjadi lebih besar.
Apakah ukuran keberhasilan MBG hanya sekadar makanan sampai ke sekolah? Atau justru keberhasilannya diukur dari apakah anak-anak benar-benar mendapatkan apa yang mereka butuhkan?
Sebab kenyang dan bergizi ternyata dua

Oleh karenanya, kata dia, penyidik akan meminta klarifikasi kepada Syah terkait asal-usul logam mulia tersebut. Selain itu, KPK juga akan melibatkan ahli untuk memastikan keasliannya.
"Terkait dengan keasliannya juga kita akan minta kepada ahli mungkin dari Antam, Pegadaian yang memang mempunyai kualifikasi untuk mengetahui barang itu asli atau tidak," jelasnya.
Selain platinum, Taufik menyebut penyidik juga turut menyita barang bukti lainnya berupa uang tunai Rp100 juta yang diduga merupakan uang suap serta uang tunai dalam berbagai mata uang asing senilai sekitar Rp1,2 miliar.

sopir Syah yang bernama Zulkifli lantas menghubungi Yaqub untuk meminta kembali pulang.
"Hal ini dikarenakan SAF mengetahui ada tim KPK sedang berada di Kabupaten Langkat. Jadi rupanya kedatangan tim juga sudah dimonitor oleh SAF," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (3/7).
Selanjutnya pada Kamis (2/7), rencana penyerahan yang kembali dibahas. Syah menugaskan orang dekatnya yang juga mantan anggota DPRD Sumatera Utara, Syahrrial untuk menghubungi Yaqub.
"Disampaikan oleh SYH bahwa situasi sedang memanas sehingga kesepakatan pemberian uang Rp100 juta yang diminta oleh SAF untuk diserahkan melalui SYH," tuturnya.
Sekitar pukul 08.00 WIB, Yaqub dan Syahrrial kemudian bertemu di sebuah kafe di Kota Medan untuk melakukan serah terima uang

lalu sumir," kata Relfy.
Disampaikan Relfy, lewat gugatan itu pihaknya berharap hakim dapat menggururkan penerapan pasal tersebut dalam perkara tudingan ijazah palsu yang menyeret Roy.
"Bagaimana merontokkan pasal tersebut agar tidak menjadi pasal yang diadukwakan, karena ancaman hukumannya kan delapan tahun, jadi kalau dikabulkan ya pasal itu rontok," tutur dia.
Relfy menyebut dalam gugatan tersebut, pihaknya tak serta merta meminta hakim menggururkan status tersangka Roy. Sebab, kata dia, banyak gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka yang ditolak oleh pengadilan.
"Kita belum sampai di sana (status tersangka gugur). Karena kalau sampai di sana, nanti mudah sekali dipatahkan kan, karena selama ini penetapan tersangka itu menjadi materi utama praperadilan banyak orang kan, tapi mudah sekali dipatahkan. Jadi kita sisir satu-satu dulu," ujarnya.
Sebelumnya, Roy Suryo juga telah menga-

sepeda motor listrik.
Ia menjelaskan pengadaan proyek motor listrik tersebut kemudian dilakukan bersama Lodewyk Pusung (LP) yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala BGN dan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT), Andri Mulyono (AM).
"Melakukan pengadaan sepeda motor listrik dengan anggaran sebesar Rp1.035.515.297.908,02 (Rp1 triliun)," ujarnya kepada wartawan di Kejagung, Kamis (2/7).
Syarief menjelaskan, pengadaan sepeda motor listrik tersebut dilaksanakan secara melawan hukum karena tidak memenuhi persyaratan dalam kontrak dan adanya mark up harga.
Dalam pelaksanaan pengadaan sepeda motor listrik tersebut, terdapat adanya manipulasi berita acara serah terima barang.

pembangunan. Melalui statistik yang dihasilkan, pemerintah dapat memahami kebutuhan pelaku usaha, melihat potensi ekonomi setiap daerah, serta merancang program pemberdayaan UMKM, pengembangan investasi, dan berbagai kebijakan lainnya berdasarkan kondisi yang terukur dan data yang terkini.
BPS menyatakan, hasil Sensus Ekonomi tidak disajikan dalam bentuk data individu maupun data setiap usaha, melainkan berupa

perkara yang kadang tidak selalu berjalan bersama.
Semanguk mi instan juga bisa membuat perut terasa penuh. Segelas minuman manis juga bisa menghilangkan lapar sesaat. Tetapi tubuh anak-anak tidak dibangun hanya dengan rasa kenyang.
Tubuh mereka sedang menyusun tulang. Sedang membangun otot. Sedang membentuk sel-sel baru setiap hari. Mereka sedang tumbuh. Dan pertumbuhan tidak bisa dinegosiasikan.
Sesungguhnya perjalanan sepiring makanan itu sebelum sampai ke meja anak-anak kita ternyata menyusuri rute yang tidak pendek. Di situlah mulai muncul kekhawatiran kecil bahwa anggaran yang semestinya hadir di atas piring anak-anak justru banyak berceceran di jalan.
Ada tahap pembelian bahan. Ada orang yang memasak. Ada wadah yang harus disiapkan. Ada kendaraan yang mengangkut. Ada petugas yang membagikan. Ada sekolah yang menerima.
Di setiap titik itu ada biaya. Ada tenaga. Ada proses. Dan semakin panjang rantainya, semakin

"Uang tunai dalam valuta asing total senilai Rp1,22 miliar, dengan rincian SGD 66.950, RM 11.518, dan Rp 244,7 juta," tuturnya.
Lebih lanjut, KPK juga menyita dua rekening bank atas nama Syah dengan saldo sekitar Rp 2,27 miliar, serta barang bukti elektronik dan dokumen.
Sebelumnya KPK resmi menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin (SAF) sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait suap proyek.
Selain Afandin, KPK juga menetapkan Yaqub Abdhal Al Mu'arif, selaku pihak swasta sekaligus tim sukses Afandin pada Pilkada 2024 sebagai tersangka dalam kasus ini.(**cnni/js**)

sebesar Rp100 juta. Setelah uang berpindah tangan, Syahrrial lalu berangkat menuju Kota Binjai.
Dalam perjalanan Syahrrial menuju Binjai itulah tim penyidik KPK menghentikan kendaraan yang ditumpangnya dan mengamankan uang tersebut.
"Penyerahan serah terima uang yang 100 juta sudah dilakukan, tim KPK di lapangan kemudian berhasil mengamankan uang 100 juta yang ditemukan di bawah jok kursi di mobil yang ditumpangi oleh saudara SYH," jelasnya.
Atas perbuatannya, KPK resmi menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin (SAF) sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait suap proyek.
Selain Afandin, KPK juga menetapkan Yaqub Abdhal Al Mu'arif, selaku pihak swasta sekaligus tim sukses Afandin pada Pilkada 2024 sebagai tersangka dalam kasus ini.(**cnni/js**)

jukan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk menguji sah atau tidaknya pengegeledahan.
Permohonan tersebut didaftarkan ke pengadilan pada Senin, 22 Juni 2026, teregistrasi dengan nomor perkara: 99/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.
Tergugat I adalah Pemerintah cq Kapolda Metro Jaya cq Dirreskrimum Polda Metro Jaya cq Kasubdit Kamneg cq Tim Penyidik.
Tergugat II adalah Pemerintah cq Jaksa Agung RI cq Jampidum pada Kejaksaan Agung cq Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
"Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa pengegeledahan," dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Selasa (23/6).
Sidang perdana gugatan praperadilan itu telah digelar di PN Jaksel pada Senin (29/6). Rencananya, sidang pembacaan putusan akan digelar pada Selasa (7/7).(bnni/js)

"Adapun realisasinya baru sebanyak 3.229 unit dari 21.081 unit kendaraan, tetapi telah dilakukan pembayaran sebesar 100 persen sehingga mengakibatkan kerugian negara," ujarnya.
Kendati demikian, Syarief mengatakan meskipun telah ditemukan bukti keterlibatan tersebut pihaknya masih belum menetapkan Budi sebagai tersangka.
Ia beralasan lantaran statusnya masih sebagai anggota TNI aktif maka penanganan kasusnya akan dilakukan secara koneksitas bersama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer.
"Karena kami di Pidsus itu tidak bisa memproses atau menterangsangkan TNI aktif. Itu dilakukan dengan cara koneksitas, makanya kami serahkan ke Jampidmil untuk selanjutnya akan diproses oleh Jampidmil," katanya.(bnni/js)

statistik agregat untuk menjaga kerahasiaan identitas maupun informasi setiap responden.
Hal ini sejalan dengan Undang-Undang yang menjamin kerahasiaan dan keamanan data responden. BPS memastikan, seluruh informasi yang diberikan responden hanya digunakan untuk penyelenggaraan statistik resmi, dan tidak dipublikasikan dalam bentuk yang dapat mengungkap identitas individu maupun usaha.(bnni/js)

banyak juga titik yang harus dijaga.
Karena kita semua tahu, dalam perjalanan yang panjang, selalu ada kemungkinan sesuatu berkurang di tengah jalan. Kadang berkurang karena biaya. Kadang berkurang karena proses. Kadang juga berkurang karena hal-hal yang tidak pernah terlihat oleh mata orang tua.
Maka wajar jika ada yang mulai bertanya, dari sepiring makanan yang diterima anak-anak itu, sebenarnya berapa yang benar-benar berubah menjadi makanan, dan berapa yang habis di perjalanan?
Saya tidak sedang menuduh siapa-siapa. Saya hanya sedang mencoba menjadi orang tua biasa. Karena orang tua memang sering berpikir terlalu jauh ketika urusannya menyangkut anak.
Sebab jika negara sudah memutuskan masuk sampai ke isi piring anak-anak kita, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar rasa makanan.
Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan. Dan kepercayaan, seperti halnya gizi, harus benar-benar sampai utuh ke tangan anak-anak.

Bupati Gowa

Dari Halaman 1

"Saya bersama kuasa hukum telah melaporkan dua orang terkait pencemaran nama baik dan kesaksian palsu di pansus hak angket," kata Husniah kepada wartawan, Sabtu (4/7).
Pelaporan tersebut, kata Husniah, terkait keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut yang dianggapnya telah menimbulkan fitnah di masyarakat dan mencemarkan nama baiknya secara pribadi maupun sebagai kepala daerah.
"Saya bukan orang hukum, tapi saya bisa menilai apa yang disampaikan Saenal Abidin itu melanggar aturan, khususnya terkait profesinya sebagai wartawan dalam hal ini pelanggaran kode etik jurnalistik. Begitu juga Agus Harahap kesaksiannya palsu dan pencemaran nama baik," ungkapnya.
Sementara terkait pansus hak angket DPRD Gowa, Husniah menegaskan siap hadir menghadiri sidang jika diundang untuk memberikan klarifikasi dengan fakta yang ada. Namun, sampai saat ini pansus belum pernah ada panggilan.
"Sejak pansus hak angket ini bergulir, belum ada sama sekali saya diberi undangan. Info yang beredar, Senin lusa katanya saya dipanggil, tapi sampai saat ini tidak ada undangan penyampaian," katanya. (bnni/js)

Korban Tewas Gempa

Dari Halaman 1

Sementara itu, tim penyelamat internasional mulai mengakhiri operasi pencarian korban selamat di antara reruntuhan bangunan.
Jumlah korban meninggal meningkat lebih dari 300 orang dibandingkan data pada Jumat (3/7) menjadi sebanyak 2.954 jiwa.
Bencana yang terjadi pada 24 Juni itu juga menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan kini bertahan di jalanan maupun tenda pengungsian.
Selain itu, puluhan ribu orang lainnya masih dilaporkan hilang. Pemerintah Venezuela belum mengeluarkan jumlah perkiraan resmi, tetapi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan sebanyak 50.000 orang masih belum diketahui nasibnya setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi secara beruntun.
Salah satu bencana gempa bumi terburuk dalam sejarah Amerika Latin itu paling parah melanda wilayah pesisir La Guaira di utara ibu kota Caracas. Di kawasan tersebut, banyak kompleks permukiman rata dengan tanah. (bnni/js)



muncul seruan agar masyarakat menjadi garda terdepan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Di berbagai daerah, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial mengajak warga untuk aktif melaporkan aktivitas mencurigakan, memperkuat ketahanan keluarga, serta membangun lingkungan yang bebas narkoba. Ajakan tersebut menunjukkan kesadaran bahwa perang melawan narkoba tidak mungkin dimerangkan oleh aparat semata.
Partisipasi masyarakat tidak boleh dimaknai sebagai tindakan main hakim sendiri.
Keberanian warga harus diwujudkan dalam bentuk kepedulian, pengawasan lingkungan, dan kerja sama yang baik dengan aparat penegak hukum. Masyarakat memiliki peran penting sebagai mata dan telinga yang dapat memberikan informasi awal mengenai dugaan peredaran narkoba. Selanjutnya, aparatlah yang harus bertindak secara profesional berdasarkan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, aparat juga harus mampu membangun kepercayaan publik. Tidak sedikit warga yang enggan melapor karena khawatir identitasnya bocor atau takut mendapat ancaman dari jaringan pelaku. Kekhawatiran seperti ini harus dijawab dengan sistem perlindungan saksi yang baik, pelayanan yang cepat, dan penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam memutus mata rantai peredaran narkotika.
Pemberantasan narkoba juga tidak cukup hanya melalui penangkapan.
Pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua perlu membangun komunikasi yang hangat dengan anak-anaknya, mengenali perubahan perilaku mereka, dan memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba sejak dini. Sekolah, kampus, rumah ibadah, organisasi kepemudaan, hingga komunitas lokal juga harus menjadi ruang edukasi yang terus mengingatkan bahwa narkoba bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi ancaman terhadap masa depan bangsa.
Perlu diingat bahwa bandar narkoba tidak hanya menjual barang haram, tetapi juga menjual harapan palsu berupa keuntungan instan. Mereka memanfaatkan lemahnya ekonomi, rendahnya pendidikan, dan rapuhnya pengawasan sosial. Oleh karena itu, pemberantasan narkoba harus dibarengi dengan upaya memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat pendidikan karakter.
Kolaborasi merupakan kata kunci. Pemerintah, kepolisian, Badan Narkotika Nasional, pemerintah daerah, tokoh agama, akademisi, media massa, hingga masyarakat sipil harus berjalan dalam irama yang sama. Ketika satu pihak bekerja sendiri, jaringan narkoba akan selalu menemukan celah.
Sebaliknya, ketika semua elemen bergerak bersama, ruang gerak para pelaku akan semakin sempit.
Perang melawan narkoba bukanlah pekerjaan sehari atau semusim. Ini adalah perjuangan panjang yang membutuhkan keberanian, konsistensi, dan solidaritas. Masyarakat tidak boleh takut untuk peduli, sementara aparat tidak boleh lelah untuk hadir dan melindungi. Sinergi keduanya akan menjadi benteng terkuat dalam menjaga generasi bangsa dari ancaman narkotika.
Keberhasilan memberantas narkoba bukan hanya diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari semakin sedikitnya anak-anak bangsa yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika. Ketika masyarakat dan aparat saling percaya serta bekerja sama, harapan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, aman, dan bebas narkoba bukanlah sesuatu yang mustahil.